



**LLDikti7**  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah VII Jawa Timur

# RENCANA STRATEGIS 2020-2024



**LLDIKTI WILAYAH VII**

Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita atas tersusunnya revisi Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII periode 2020 -2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Renstra ini merupakan rencana dari LLDIKTI Wilayah VI untuk 5 tahun kedepan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020-2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Tujuan revisi renstra ini adalah sebagai tindak lanjut dari perkembangan dan capaian target yang tercantum dengan penyesuaian terhadap renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta sebagai tindak lanjut dari arahan eselon I agar ada penyelarasan dengan renstra di atasnya dengan melengkapi indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran. Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang professional, inovatif dan motivasi yang tinggi dari setiap pelaku kegiatan di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan revisi Renstra LLDIKTI Wilayah VIII periode tahun 2020-2024. Kami mengajak semua pihak untuk berkomitmen kuat guna mensukseskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan upaya yang telah digariskan dalam Renstra ini.

Surabaya, Juli 2022

Kepala,



Prof. Dr. Dyah Sawitri, SE., MM.

NIP 196704192005012001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum .....	2
C. Permasalahan yang Dihadapi LLDIKTI Wilayah VII.....	11
BAB II.....	15
VISI, MISI, DAN TUJUAN .....	15
A. Visi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII .....	15
B. Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII .....	16
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	16
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....	17
BAB III .....	19
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .	19
A. Arah Kebijakan dan Strategi .....	19
B. Kerangka Regulasi .....	27
C. Kerangka Kelembagaan .....	28
D. Reformasi Birokrasi.....	32
BAB IV.....	34
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	34
A. Target Kinerja.....	34
B. Kerangka Pendanaan.....	36
BAB V .....	37
PENUTUP .....	37
LAMPIRAN.....	38

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kualifikasi pendidikan dan Jabatan Akademik Dosen PNS DPK .....	3
Tabel 1. 2 Golongan/Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen PNS DPK .....	3
Tabel 1. 3 Peringkat Nasional PTS LLDIKTI VII .....	7
Tabel 1. 4 Jabatan Akademik Dosen PTS Jawa Timur Tahun 2022 .....	7
Tabel 1. 5 Data Dosen PTS Jawa Timur berdasarakan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 .....	8
Tabel 1. 6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi.....	12
Tabel 1. 7 Statistik Data Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur Berdasarkan Kota/Kabupaten .....	13
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan.....	17
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 .....	20
Tabel 3. 2 Tenaga Administrasi LLDIKTI Wilayah VII .....	31
Tabel 3. 3 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Administrasi LLDIKTI Wilayah VII .....	31
Tabel 4. 1 Target Kinerja Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 .....	34
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2021.....	36
Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah VII Periode 2022-2024.....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Akreditasi Institusi PTS Jawa Timur Tahun 2022.....	5
Gambar 1. 2 Akreditasi Prodi PTS Jawa Timur Tahun 2022.....	6
Gambar 1. 3 Skema Penguatan Pendidikan Karakter .....	9
Gambar 3. 1 Profil Pelajar Pancasila.....	24
Gambar 3. 2 Kebijakan Merdeka Belajar .....	26
Gambar 3. 3 Struktur LLDIKTI Wilayah VII sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021 .....	30
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VII .....	30

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan, kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, mereka saling melengkapi membentuk komponen dalam mendukung pembangunan cita-cita Bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD amandemen ke-4, batang tubuh konstitusi tersebut di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 bahwa cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial menjadi tonggak bangsa Indonesia dalam menyongsong 100 (seratus) tahun kemerdekaannya. Pada akhirnya akan mewujudkan cita-cita itu melalui Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Namun perlu diketahui dan dipersiapkan bahwa kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Upaya pembangunan sumber daya manusia yang berpadanan dengan kemajuan iptek dan perkembangan dunia global, akan menjadikan Indonesia siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan serta berwenang dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Salah satu bentuk mewujudkan amanat Kemendikbudristek dalam peningkatan mutu pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI Wilayah VII) yang notabennya bertugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi berupaya menyusunnya dalam dokumen kebijakan jangka menengah yakni dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan melalui peningkatan mutu dan

pengelolaan pendidikan tinggi. Dokumen Renstra ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. Selain itu melalui Renstra ini LLDIKTI Wilayah VII berupaya untuk menjabarkan terkait Susunan Kerja setelah diberlakukannya Permendikburistek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

## **B. Kondisi Umum**

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. LLDIKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pembinaan LLDIKTI secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. Tugas dan fungsi LLDIKTI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala.

LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di kota Surabaya tepatnya di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No.177, yang memiliki lingkup kerja di wilayah Jawa Timur dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dimana fungsi diterbitkannya peraturan yang dimaksud adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi.

LLDIKTI Wilayah VII saat ini membawahi 323 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur. Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi mitra kerja LLDIKTI Wilayah VII memiliki 2.271 program studi, 23.639 dosen dan 611.371 mahasiswa aktif dalam lingkup koordinasinya. Oleh karena itu LLDIKTI Wilayah VII memiliki peran besar sebagai fasilitator untuk mentransformasikan program-program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai induk organisasi dalam menghasilkan apa yang telah dirumuskan pada RPJMN 2020-2024. LLDIKTI Wilayah VII didukung oleh 23.639 dosen yang didalamnya terdapat 975 orang Dosen PNS diperbantukan (DPK) tersebar di 126 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur dengan komposisi pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1. 1 Kualifikasi pendidikan dan Jabatan Akademik Dosen PNS DPK**

Kualifikasi Pendidikan Dosen PNS Dpk	Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk					Jumlah
	Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	
Sarjana	0	0	1	0	0	1
Magister	0	240	326	92	8	666
Doktor	49	137	107	14	1	308
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>49</b>	<b>377</b>	<b>434</b>	<b>106</b>	<b>9</b>	<b>975</b>

**Tabel 1. 2 Golongan/Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen PNS DPK**

Golongan Dosen PNS Dpk	Jabatan Akademik Dosen PNS Dpk					Jumlah
	Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	
III/a	0	0	7	53	1	61
III/b	0	1	28	42	4	75
III/c	1	2	236	3	3	245
III/d	1	7	154	5	0	167
IV/a	1	207	7	2	1	218
IV/b	2	99	1	1	0	103
IV/c	8	61	1	0	0	70
IV/d	23	0	0	0	0	23
IV/e	13	0	0	0	0	13
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>377</b>	<b>434</b>	<b>106</b>	<b>9</b>	<b>975</b>

### Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) mendorong peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM unggul. Berdasarkan data dari Dirjen Dikti Kemendikbudristek APK pendidikan tinggi saat ini baru 31% sementara target pada tahun 2024 APK

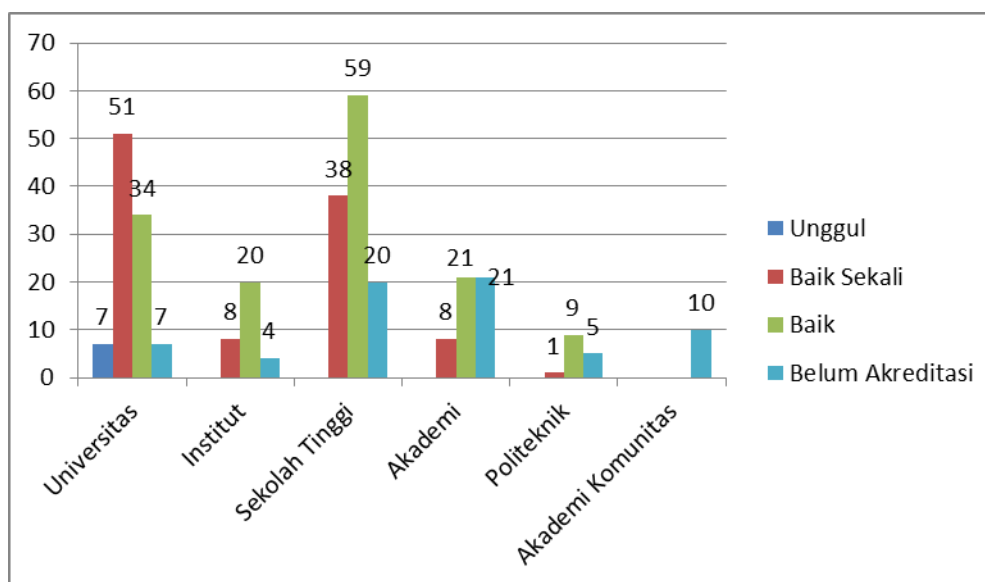
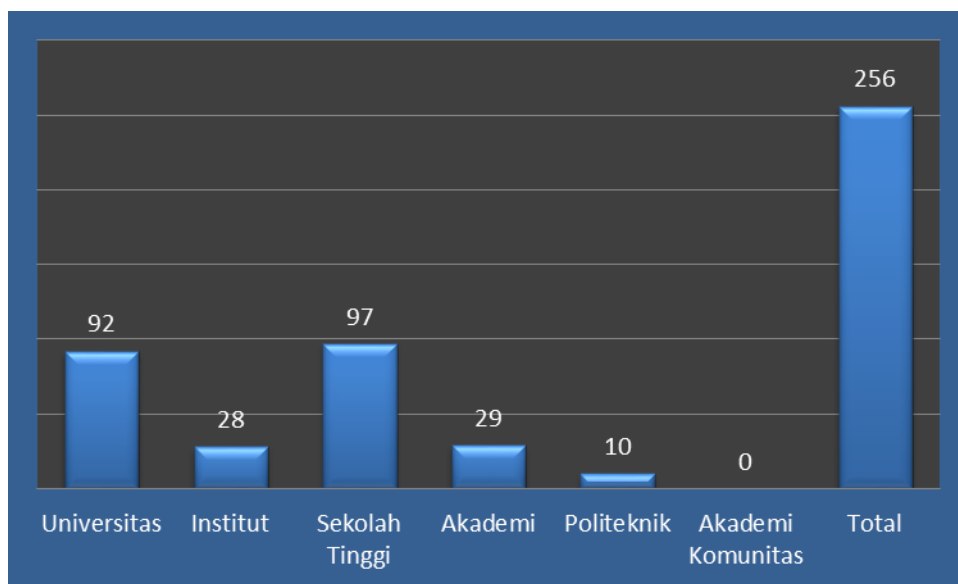
pendidikan tinggi adalah 37%. Di sisi lain, bonus demografi tidak serta merta menjadi kekuatan ekonomi tanpa ada persiapan SDM unggul. Murujuk data dari Sirjen DIKTI Kemendikbudristek mahasiswa yang terdaftar di Dikti ada 7,9 juta. Sedangkan jumlah mahasiswa baru ada 2 jutaan yang berada di PTN dan juga PTS. Sehingga dari sini dapat dikatakan APK memang perlu akan tetapi mengandalkan APK saja belum cukup sebab mahasiswa harus bisa masuk ke pendidikan tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan SDM-SDM yang betul-betul unggul. Adapun strategi peningkatan APK pertama dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas PTN dan merger PTS-PTS kecil.

APK pendidikan tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif. Sejak tahun 2015, APK belum mencapai target Renstra Kemendikbudristek. Meskipun masih di bawah target Renstra Kemendikbudristek, pencapaian APK pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh enam persen) pada awal Renstra Kemendikbudristek yang lalu (tahun 2015) menjadi 30,28% (tiga puluh koma dua puluh delapan persen) pada penghujung Renstra Kemendikbudristek. Kenaikan yang terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah. Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik baik.

### **Pemerataan Mutu Pendidikan**

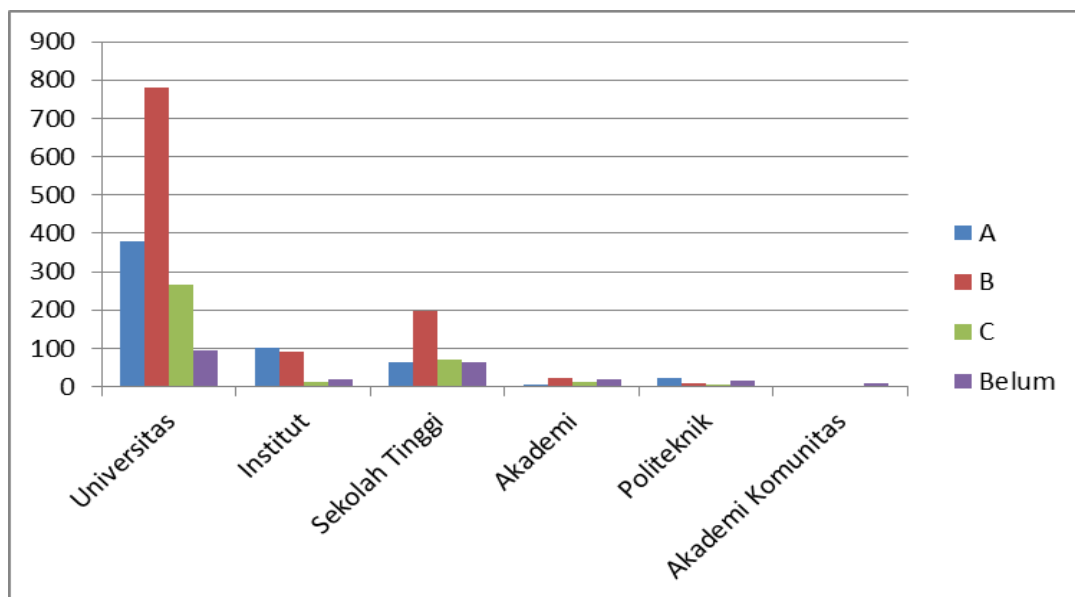
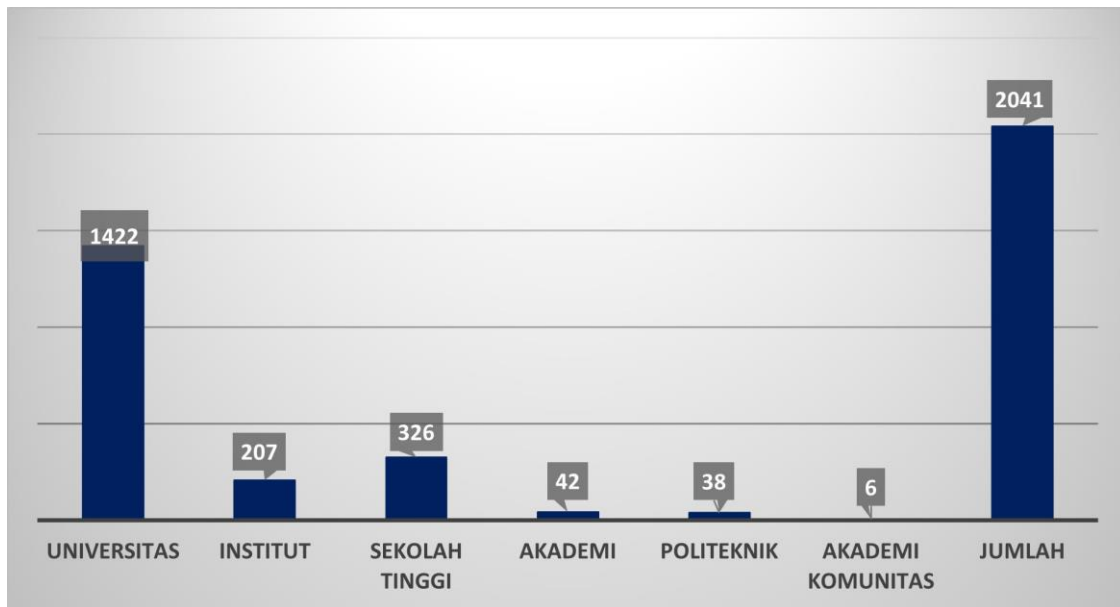
Permasalahan mutu pendidikan ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha yang harus diupayakan dengan terus menerus agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya untuk pemeratakan mutu Pendidikan di Indonesia dengan tujuan untuk (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi (2) meningkatkan mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan secara berkelanjutan. Pada sektor pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta Jawa Timur, LLDIKTI Wilayah VII terus berupaya untuk peningkatan mutu melalui fasilitasi dalam mendukung proses akreditasi institusi dan prodi. Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan tinggi oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi. Akreditasi dapat memberikan manfaat dan menjadi media informasi bagi semua pihak, baik itu pemerintah, calon mahasiswa atau orang tua, pasar kerja nasional maupun internasional, organisasi penyandang dana, dan bagi perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan mengenai kualitas perguruan tinggi serta lulusannya. Berdasarkan penarikan data melalui akses Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada bulan Mei 2022 dari 323 perguruan tinggi swasta aktif di Jawa Timur diketahui ada 256 PTS atau 79% yang sudah terakreditasi institusi dengan sebaran seperti dalam gambar 1.2 di bawah ini, sedangkan 21% sisanya sebanyak 67 PTS belum terakreditasi.

**Gambar 1. 1 Akreditasi Institusi PTS Jawa Timur Tahun 2022**



Sedangkan untuk 2.271 program studi aktif yang ada di LLDIKTI Wilayah VII sudah terakreditasi sebanyak 2.041 prodi. Artinya hanya ada 11% dari total prodi yang belum terakreditasi. Berikut ini adalah gambaran akreditasi prodi PTS di Jawa Timur tahun 2022.

**Gambar 1. 2 Akreditasi Prodi PTS Jawa Timur Tahun 2022**



Pemeringkatan perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur mutu lembaga perguruan tinggi sehingga LLDIKTI Wilayah VII mendorong perguruan tinggi swasta di Jawa Timur yang masuk top 100 nasional untuk mendokumentasikan kiprahnya agar menjadi inspirasi untuk perguruan tinggi yang lain. Berikut capaian peringkat nasional PTS LLDIKTI Wilayah VII pada periode Renstra sebelumnya.

**Tabel 1. 3 Peringkat Nasional PTS LLDIKTI VII**

No	Perguruan Tinggi Swasta	Peringkat
1	Universitas Surabaya	31
2	Universitas Muhammadiyah Malang	38
3	Universitas Kristen Petra	43
4	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	52
5	Universitas Ma Chung	53
6	Institut Teknologi Nasional Malang	56
7	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	57
8	STIE Perbanas Surabaya	67
9	Universitas Ciputra Surabaya	72
10	Universitas Widya Gama Malang	76
11	STIE Malangkececwara	80
12	Universitas Narotama	83
13	Universitas Islam Malang	85
14	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	87
15	Universitas Merdeka Madiun	91
16	Universitas Dr. Soetomo	93
17	Akademi Keperawatan Pamenang	32
18	Politeknik Ubaya	39

Upaya untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan juga dilakukan LLDIKTI Wilayah VII melalui peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari PDDIKTI pada bulan Mei 2022 ada 23.639 dosen yang tersebar di seluruh PTS di Jawa Timur dengan jabatan akademik Asisten Ahli sebanyak 7.772 dosen dan jabatan Lektor terdapat 4.211 dosen. Selanjutnya untuk jabatan akademik sebagai Lektor Kepala sejumlah 1.391 dosen dan Guru Besar atau Profesor sebanyak 243 dosen. Adapun untuk tabel dosen dengan jabatan akademik sebagai berikut.

**Tabel 1. 4 Jabatan Akademik Dosen PTS Jawa Timur Tahun 2022**

Jabatan Akademik Dosen PTS Jawa Timur Tahun 2022				
Profesor	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Jumlah
243	1.391	4.211	7.772	13.617

Sedangkan untuk sebaran dosen di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII berdasarkan kualifikasi akademik adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. 5 Data Dosen PTS Jawa Timur berdasarakan Jenjang Pendidikan Tahun 2022**

<b>Data Dosen PTS Jawa Timur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022</b>			
<b>Sarjana</b>	<b>Magister</b>	<b>Doktor</b>	<b>Spesialis</b>
1.431	1.7969	3280	104

### **Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan**

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode sebelumnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatan mutu pembelajaran dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wajib dilakukan. Kualitas pembelajaran juga dapat dilihat dari jumlah mahasiswa yang berprestasi dan berwirausaha.

#### *Mahasiswa Berprestasi*

Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi, baik akademik maupun non akademik, mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bersikap positif, serta berjiwa Pancasila. Raihan prestasi memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler sebagai wahana mensinergikan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa dengan cara mengikuti kompetisi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Tingkat Nasional, kompetisi olahraga tingkat nasional, dan sebagainya. Pada akhir tahun 2021 terdapat ... mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII yang tersebar di 323 PTS Jawa Timur. Berbagai kegiatan yang mendukung mahasiswa untuk berprestasi selama tahun 2021 telah terselenggara dengan baik meliputi PKM, PIMNAS, ONMIPA, PILMAPRES, NUDC dan KDMI.

#### *Mahasiswa Berwirausaha*

Untuk menumbuhkan daya saing bangsa perlu ditumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar kelak bisa menjadi kelompok orang yang menciptakan lapangan pekerjaan (*job creator*) dan bukan hanya sekedar pencari pekerjaan (*job seeker*). Berbagai strategi diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia antara lain dengan memasukkan mata kuliah kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan dan mengadakan berbagai kegiatan kewirausahaan khususnya di tingkat perguruan tinggi seperti kegiatan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI). LLDIKTI Wilayah VII mengukur capaian indikator kinerja jumlah

mahasiswa PTS yang berwirausaha menggunakan data jumlah mahasiswa yang telah melakukan start-up business baik dari peserta KBMI ataupun tidak dan ditunjukkan dengan bukti foto usaha. Pada akhir Renstra periode sebelumnya, terdapat 411 mahasiswa PTS yang berwirausaha.

### *Penguatan Karakter*

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti korupsi. Dengan terlibatnya banyak pihak dalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dalam Gambar 1.3.

**Gambar 1. 3 Skema Penguatan Pendidikan Karakter**



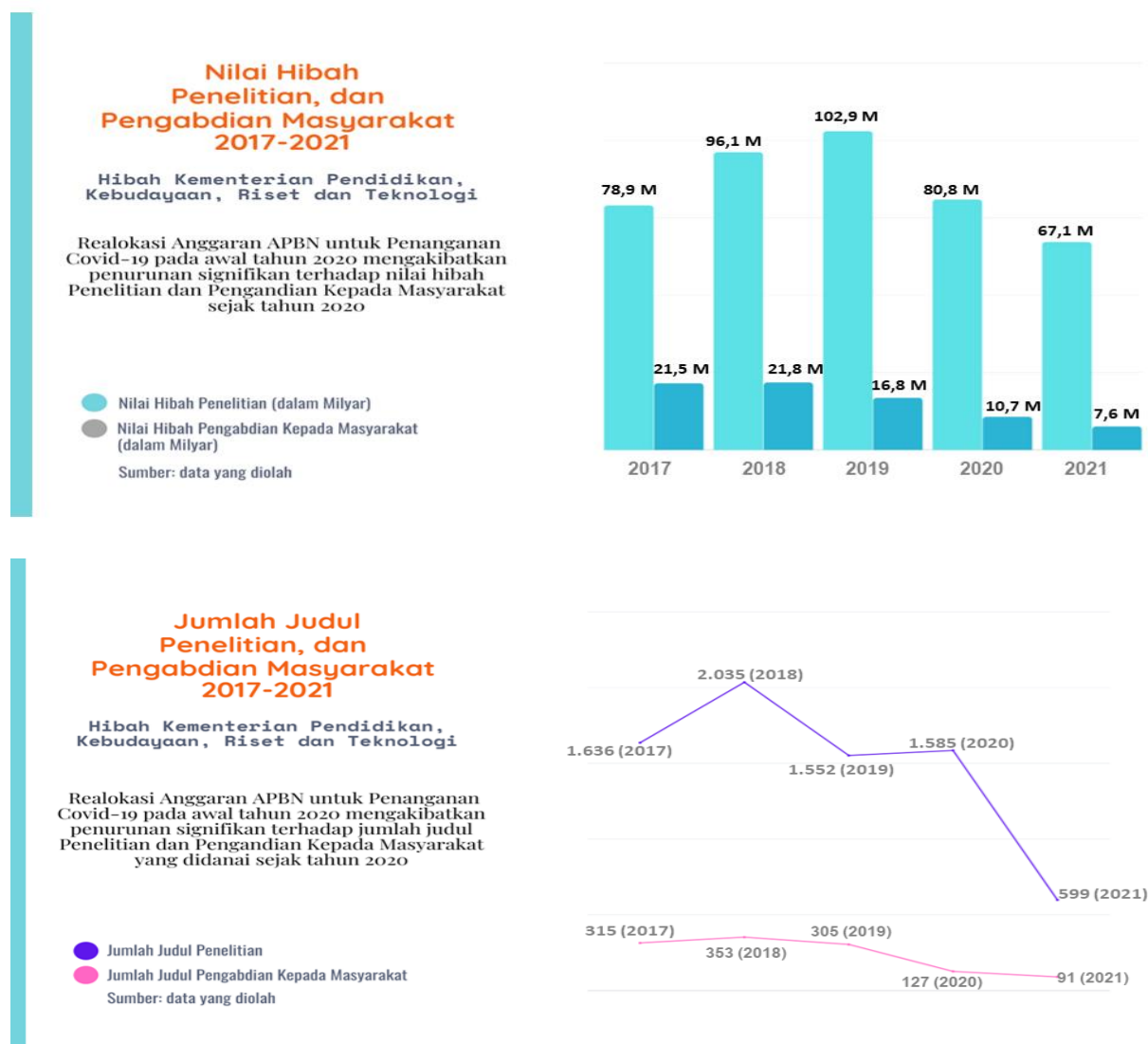
Sumber: [https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page\\_id=132](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132)

Sebagian besar perguruan tinggi di wilayah kerja LLDIKTI VII telah mengimplementasikan 4 (empat) kebijakan terkait pendidikan karakter yaitu antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) pimpinan perguruan tinggi, berbagai media yang ada serta kegiatan yang dilakukan. Dari sini dapat diketahui terdapat peningkatan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

terkait penguatan karakter mahasiswa yang dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VII sehingga terjadi kenaikan jumlah PTS yang mengimplementasi kebijakan ini. Beberapa PTS yang dianggap belum mengimplementasikan 4 (empat) kebijakan ini telah memiliki satu, dua atau tiga kebijakan bahkan kebijakan yang lain seperti antinarkoba dan antiradikalisme.

### Kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan

LLDIKTI Wilayah VII menerima sejumlah hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang disalurkan kepada Perguruan Tinggi Swasta sebagai stimulus untuk meningkatkan kualitas penelitian dan daya saing menuju *World Class University* serta mampu menghilirisasi hasil penelitian menuju produk-produk inovasi. Berikut gambaran pengelolaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII selama lima tahun terakhir.



### **C. Permasalahan yang Dihadapi LLDIKTI Wilayah VII**

Pendidikan tinggi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah kerja LLDIKTI Wilayah VII, dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan untuk peningkatan mutu. Untuk itu, LLDIKTI Wilayah VII terus berupaya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pendidikan tinggi berupa: 1) Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi dan 2) Ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis.

#### **Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur**

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Antara lain ketidakmampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi Dikti hanya 11% (sebelas persen). Ini jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen). Terakhir, ada persepsi yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan ukuran dalam menghitung besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari suatu jenjang Pendidikan tertentu, salah satunya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. APK Pendidikan Tinggi yang diraih dalam suatu wilayah memiliki arti penting sebagai salah satu indikator capaian Indeks Pendidikan Tinggi dalam wilayah tersebut. Besarnya APK suatu jenjang pendidikan menunjukkan kualitas layanan pemerintah terhadap hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, besaran APK juga menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh kemudahan dalam akses menempuh Pendidikan Tinggi. Persentase APK dapat digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan kemahasiswaan perguruan tinggi di wilayah tersebut.

Merujuk perhitungan APK yang dilakukan oleh BPS yaitu dengan menggabungkan mahasiswa aktif pada PTS dengan PTN kemudian dibagi dengan jumlah penduduk berusia 19-23 tahun wilayah Jawa Timur hampir setiap tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Namun peningkatan hanya berkisar rata-rata 0,3. Meskipun begitu data-data tersebut jika dibandingkan dengan APK Pendidikan Tinggi di wilayah provinsi lain di Pulau Jawa, wilayah Jawa Timur masih tertinggal dibandingkan

dengan provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. APK Pendidikan Tinggi di DI Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 74,90, DKI Jakarta 40,05, dan provinsi Banten mencapai 32,51. Sedangkan provinsi Jawa Timur angka partisipasi kasar hanya mencapai 29,96. Berikut tabel perbandingan APK perguruan tinggi di Pulau Jawa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

**Tabel 1. 6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi**

Provinsi	2019	2020	2021
Dki Jakarta	39.43	40.34	40.05
Jawa Barat	25.15	25.75	25.83
Jawa Tengah	21.80	22.62	23.86
DI Yogyakarta	73.14	74.69	74.90
Jawa Timur	29.20	29.52	29.96

Sumber: bps.go.id

Ada beberapa penyebab rendahnya angka APK ini. Pertama, yakni akses masyarakat terhadap perguruan tinggi yang masih relatif rendah, baik dari segi pembiayaan, yang bagi sebagian masyarakat dirasa cukup mahal, maupun dari segi besaran daya tampung yang juga terbatas. Penyebab yang kedua yaitu budaya serta mentalitas masyarakat yang masih memandang tinggi anaknya harus masuk di perguruan tinggi negeri (PTN) sedangkan masih banyak perguruan tinggi swasta (PTS) yang dapat juga menjadi pilihan.

### **Ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan geografis, regulasi, dan tata kelola. Dari segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tentunya hal ini pun terjadi di provinsi Jawa Timur. LLDIKTI Wilayah VII yang membantu dalam proses peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTS di Jawa Timur merasakan betul adanya ketimpangan pendidikan secara geografis. Hal ini mengingatkan kantor fisik LLDIKTI Wilayah VII terusat di kota Surabaya, namun harus sigap dalam fasilitasi peningkatan mutu terhadap 323 perguruan tinggi aktif di Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota. Sebaran Perguruan Tinggi Swasta tersebut terdiri dari bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi Komunitas. Potensi dan letak wilayah Perguruan

Tinggi Swasta di Jawa Timur secara geografis tersebar di Kota/Kabupaten yang memiliki karakter wilayah berbeda-beda. Ada perguruan tinggi yang berada di kota besar, dan ada yang di kota kecil. Hal ini tentunya membuat kebutuhan dan kejenuhan pendidikan di suatu Kota/Kabupaten satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Upaya yang dilakukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII diantaranya secara berkesinambungan melakukan prioritas fasilitasi peningkatan mutu di perguruan tinggi yang terletak di Kota/Kabupaten kecil. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan target pemerintah daerah agar pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia dapat merata di semua wilayah. Bentuk konkret yang dilakukan diantaranya dengan terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS). Berikut tabel sebaran data PTS Jawa Timur berdasarkan Kota/Kabupaten yang bersumber dari Sub Koordinasi Kelembagaan dan Kerja Sama LLDIKTI Wilayah VII.

**Tabel 1. 7 Statistik Data Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur Berdasarkan Kota/Kabupaten**

No.	Kota	Jumlah
1	Bangkalan	5
2	Banyuwangi	11
3	Batu	1
4	Blitar	5
5	Bojonegoro	8
6	Bondowoso	2
7	Gresik	10
8	Jember	17
9	Jombang	12
10	Kediri	23
11	Lamongan	5
12	Lumajang	7
13	Madiun	7
14	Magetan	2
15	Malang	54
16	Mojokerto	12
17	Nganjuk	6
18	Ngawi	3
19	Pacitan	1
20	Pamekasan	4
21	Pasuruan	12

<b>22</b>	Ponorogo	7
<b>23</b>	Probolinggo	6
<b>24</b>	Sampang	4
<b>25</b>	Sidoarjo	11
<b>26</b>	Situbondo	3
<b>27</b>	Sumenep	5
<b>28</b>	Surabaya	67
<b>29</b>	Trenggalek	2
<b>30</b>	Tuban	6
<b>31</b>	Tulungagung	5

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

### A. Visi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII

LLDIKTI Wilayah VII merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur yang bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



*LLDIKTI Wilayah VII mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.*

Visi tersebut menggambarkan komitmen LLDIKTI Wilayah VII dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang Pendidikan LLDIKTI Wilayah VII akan terus mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Tidak hanya itu, sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, LLDIKTI Wilayah VII dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan senantiasa bekerja bersama untuk memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan visi dan misi Kemendikbudristek yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Presiden.

Dalam kurun waktu 2020-2024, LLDIKTI Wilayah VII sebagai lembaga di bawah Kemendikbud yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Kemendikbudristek berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi di wilayah Jawa Timur. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan tinggi agar terwujud masyarakat Indonesia yang menjadi pembelajar seumur hidup. Layanan pendidikan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam

mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan.

## **B. Misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII**

LLDIKTI Wilayah VII dalam rangka mendukung tercapainya misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan tinggi yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan tinggi.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## **C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan**

Tujuan LLDIKTI bersumber dari Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut ini adalah Tujuan Strategis LLDIKTI Wilayah VII yang telah disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022.

1. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi yang bermutu
2. Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi pendidikan tinggi
3. Peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan.

4. Penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Tujuan LLDIKTI berasal dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi LLDIKTI Wilayah VII yang terlihat dalam tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Tujuan**

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target 2024
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	37,63
2.	Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	20,5
3.	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	%	90,5
4.	Opini laporan keuangan	Opini	WTP
5.	Predikat SAKIP	Predikat	A
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87

**D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran**

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Strategis yang telah dirumuskan, maka diperlukan sejumlah Sasaran Strategis dengan beberapa Indikator Kinerja Sasaran sebagai tolok ukur tercapainya tujuan tersebut. Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra dari Kemdikbudristek, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran merupakan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kepmendikbud No. 3/M/2021.

➤ **Tujuan Strategis 1 -> Peningkatan pemerataan layanan pendidikan tinggi yang bermutu**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 1 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	1. Persentase Layanan LLDIKTI yang tepat waktu.
	2. PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.

➤ **Tujuan Strategis 2 -> Peningkatan kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi pendidikan tinggi**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 2 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	1. Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau</li> <li>b. Meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.</li> </ul>
	2. Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi.

➤ **Tujuan Strategis 3 -> Peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 3 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

➤ **Tujuan Strategis 4 -> Penguatan tata kelola pendidikan tinggi yang partisipatif, transparan dan akuntabel**

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dirumuskan LLDIKTI Wilayah VII untuk tercapainya tujuan strategis 3 adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas tata kelola satker	1. Predikat SAKIP Satker minimal BB
	2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 80

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi**

Renstra LLDIKTI Wilayah VII harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemdikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan no (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi Kemdikbudristek periode 2020-2024 yang dapat dijadikan sebagai arah kebijakan dan strategi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024**

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
1	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan	Meningkatkan jumlah lulusan pendidikan tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dan vokasi berkualitas yang relevan</li> <li>2. Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan tinggi bagi lulusan dari keluarga tidak mampu melalui program pemerintah seperti beasiswa KIP-Kuliah / Afirmasi/Prestasi.</li> </ol>
		Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Meningkatkan kompetensi lulusan sesuai dengan dunia kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun keterlibatan dan partisipasi dunia industry untuk: (1) memetakan kebutuhan kompetensi lulusan dengan dunia kerja; (2) menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan standar industry; (3) menyediakan pemagangan dan praktik kerja; (4) mendorong penyerapan lulusan pendidikan vokasi; (5) menjamin keselarasan melalui pemberian sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan standard an kebutuhan industri</li> <li>2. Membangun kerjasama antar perguruan tinggi akademik dengan perguruan tinggi kelas dunia (internasional) dan dunia industry dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan.</li> <li>3. Menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai <i>centres of excellence</i> dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi kelas dunia dan</li> </ol>

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
				<p>pembinaan perguruan tinggi lainnya yang sedang berkembang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menitikberatkan pengembangan <i>softskills</i> seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman etos kerjaserta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja.</li> <li>5. Mengembangkan <i>platform</i> teknologi untuk memfasilitasi penyampaian informasi lapangan kerja, peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja serta sebagai alat bantu informasi untuk merekam jejak kebecerjaan lulusan.</li> </ol>
			<p>Perguruan tinggi memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan professional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan focus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industry; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; (3) kerjasama dengan pengajar dari kampus kelas dunia</li> </ol>
		<p>Kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan</p>	<p>Peningkatan jumlah penelitian perguruan tinggi yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun internasional</li> <li>2. Memperkuat proses diskusi antara perguruan tinggi dan dunia industry</li> </ol>

No	Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Kemdikbudristek	Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII	Strategi LLDIKTI Wilayah VII
			Meningkatkan jumlah hasil penelitian yang mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat</li> <li>2. Memperkuat kerjasama dengan dunia industry untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian</li> <li>3. Memperkuat mekanisme penjaminan mutu proses penelitian untuk memperoleh rekognisi internasional</li> </ol>
2	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter	Implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekeraan seksual, antiperundungan dan antikorupsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan antiintoleransi, antikekeraan seksual, antiperundungan dan antikorupsi</li> <li>2. Membentuk Satgas dan merespon cepat serta melakukan penyelesaian secara tuntas terhadap permasalahan antiintoleransi, antikekeraan seksual, antiperundungan dan antikorupsi</li> </ol>
3	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Tata kelola satker akuntabel dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan</li> <li>2. Penguatan system pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas</li> <li>3. Mengembangkan mekanisme pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi dan mekanisme manajemen talenta</li> </ol>

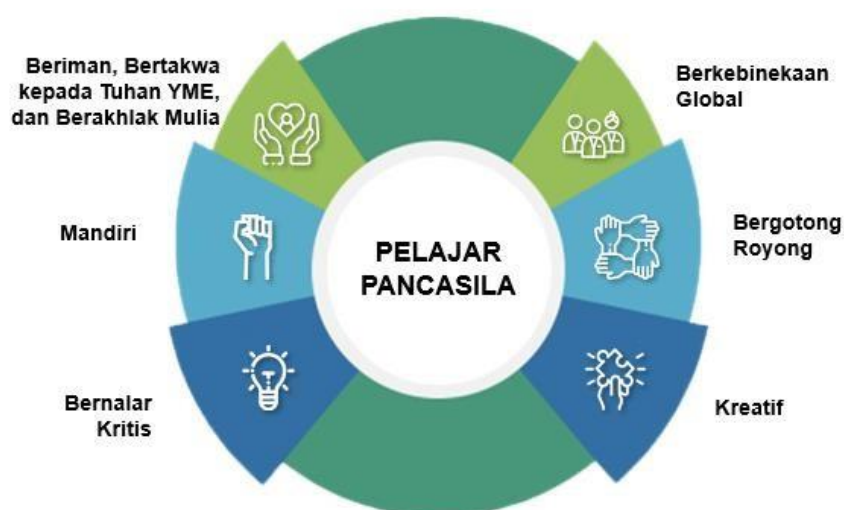
<b>No</b>	<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Arah Kebijakan Kemdikbudristek</b>	<b>Arah Kebijakan LLDIKTI Wilayah VII</b>	<b>Strategi LLDIKTI Wilayah VII</b>
			Pelayanan public prima	Pengembangan system pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti persuratan, pengadaan barang jasa, proses kepegawaian dan keuangan serta pelayanan kepada stakeholder.

Dokumen Renstra menyajikan 2 (dua) perspektif dalam pencapaian arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang selaras.

❖ **Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila)**

Profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan Pendidikan Nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan 6 (enam) ciri utama: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, (5) bernalar kritis, dan (6) kreatif

**Gambar 3. 1 Profil Pelajar Pancasila**



Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara.

- 2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam

berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

### 3) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

### 4) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

### 5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

### 6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berwawasan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya.

### ❖ *Perspektif Cara (Kebijakan Kampus Merdeka)*

Kebijakan merdeka belajar telah dikeluarkan pemerintah untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas. Merdeka belajar pada ranah pendidikan tinggi adalah kebijakan kampus merdeka dimana perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-

masing perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang terdidik dan terampil sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dan mampu bersaing dengan tenaga terampil asing. Salah satu butir kebijakan ini adalah memberikan hak belajar kepada mahasiswa di luar kampus maupun program studi yang mereka tempuh. Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3. 2 Kebijakan Merdeka Belajar



Gambar 3.2 di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- 1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya
- 2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan
- 3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan
- 4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

- (1) Ekosistem pendidikan;
- (2) Dosen;
- (3) Pedagogi;
- (4) Kurikulum; dan
- (5) Sistem penilaian.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada ranah pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- 1) Pembukaan program studi baru;
- 2) Sistem akreditasi perguruan tinggi;
- 3) Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- 4) Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

## **B. Kerangka Regulasi**

LLDIKTI Wilayah VII menggunakan beberapa regulasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Regulasi ini juga yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Beberapa regulasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Regulasi ini mengatur Tridharma Perguruan Tinggi (Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual.  
Regulasi ini menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait Indikator Kinerja Utama implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.
- c. Permendikbudristek No 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negeri Lain.
- d. Permendikbud No 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- e. Permendikbud No 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

- g. Permenpan-RB No 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- h. Permendikbud No 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
- i. Permenristekdikti No 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
- j. Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor
- k. Kepmendikbud No. 3/M/2021 Tentang Indikator Tujuan Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

### **C. Kerangka Kelembagaan**

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan melaksanakan strategi organisasi untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, LLDIKTI Wilayah VII perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu kegiatan pengembangan sumber daya aparatur dan penataan kelembagaan mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam proses tersebut kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Kerangka kelembagaan LLDIKTI Wilayah VII disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah VII menaungi 323 perguruan tinggi swasta, 2.271 program studi, 23.639 dosen dan 611.371 mahasiswa aktif dalam lingkup koordinasinya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 35 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

#### **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut LLDIKTI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Diredktur Jenderal Vokasi dan secara administrasi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. LLDIKTI Wilayah VII berkedudukan di Surabaya dengan area kerja wilayah Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala.

LLDIKTI Wilayah VII mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan tinggi
- 2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi
- 3) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi
- 4) Pelaksanaan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal
- 5) Pengelolaan data dan informasi perguruan tinggi
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan mutu perguruan tinggi
- 7) Pelaksanaan administrasi

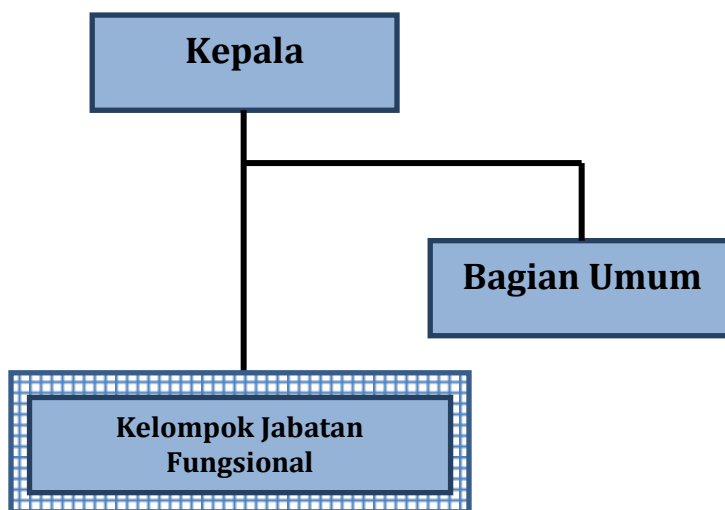
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LLDIKTI Wilayah VII berwenang:

- 1) Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
- 2) Menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII
- 3) Menyusun dan mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel

## **2. Susunan Organisasi**

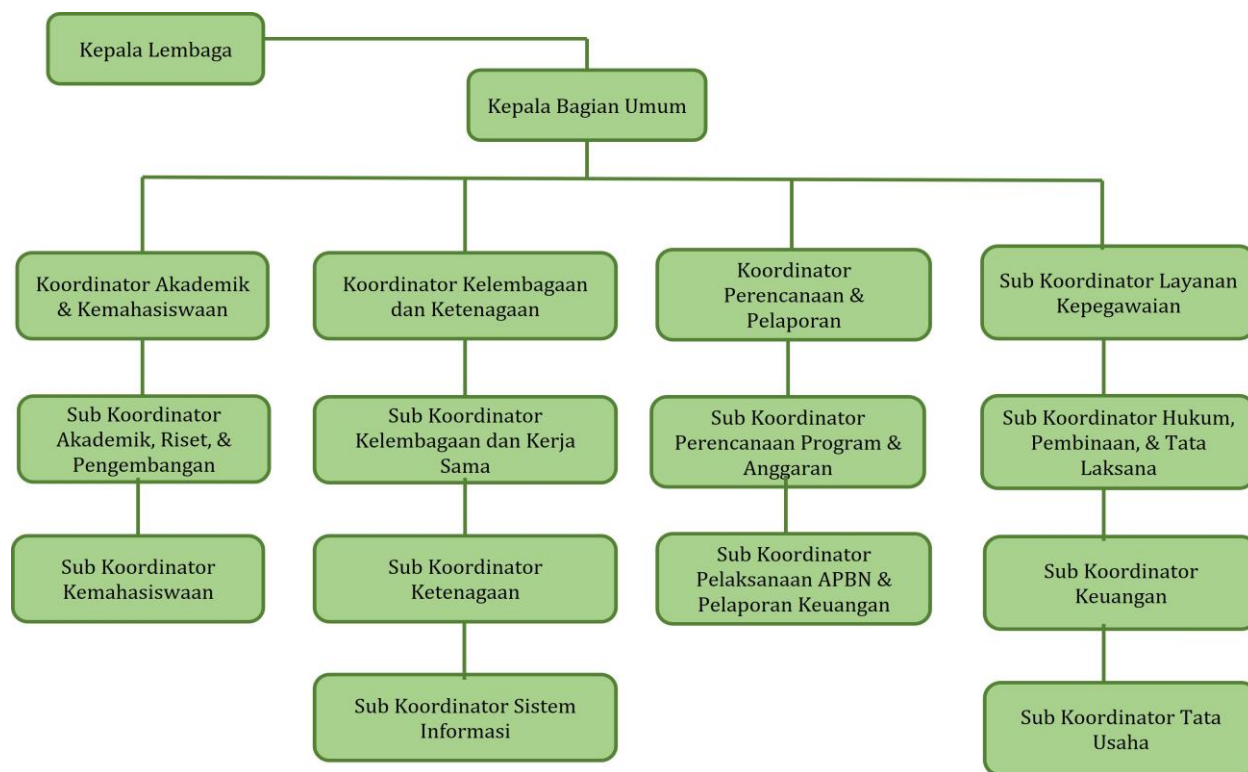
Pada saat pelantikan Presiden Indonesia untuk periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, terbentuk Kabinet Kerja Pemerintah baru dengan perubahan SOTK beberapa Kementerian, diantaranya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang semula berada di bawah Kemenristekdikti kini kembali lagi bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pun berpindah dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah VII merujuk pada Permendikburistek Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut.

**Gambar 3. 3 Struktur LLDIKTI Wilayah VII sesuai Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021**



Namun untuk menyesuaikan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang memadai di LLDIKTI Wilayah VII dibentuk struktur organisasi yang tidak baku meliputi Kepala, Kepala Bagian Umum, Koordinator dan Subkoordinator serta termasuk di dalamnya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

**Gambar 3. 4 Struktur Organisasi LLDIKTI Wilayah VII**



LLDIKTI Wilayah VII didukung oleh 110 orang pegawai tenaga administrasi yang terdiri atas 82 orang PNS dan 28 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar dalam struktur organisasi dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Tenaga Administrasi LLDIKTI Wilayah VII**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala	1
2	Kepala Bagian Umum	1
3	Koordinator/ Subkoordinator/ JFT	14
4	Sub Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran	2
5	Sub Koordinasi Pelaksanaan APBN dan Pelaporan Keuangan	2
6	Sub Koordinasi Hukum, Kepegawaian dan Tata Laksana	10
7	Sub Koordinasi Keuangan	4
8	Sub Koordinasi Umum	37
9	Sub Koordinasi Kelembagaan dan Kerja Sama	6
10	Sub Koordinasi Sistem Informasi	7
11	Sub Koordinasi Ketenagaan	10
12	Sub Koordinasi Akademik, Riset, dan Pengembangan	7
13	Sub Koordinasi Kemahasiswaan	9
	Jumlah	110

LLDIKTI Wilayah VII berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, salah satunya adalah melalui peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga administrasi.

**Tabel 3. 3 Kualifikasi Pendidikan Tenaga Administrasi LLDIKTI Wilayah VII**

Kualifikasi Pendidikan	Tenaga Administrasi		
	PNS	PPNPN	Jumlah
SD	-	2	2
SMP	2	3	5
SMA	10	13	23
Diploma III	10	2	12
Sarjana (S1)	40	6	46
Magister (S2)	19	2	21
Doktor (S3)	1	-	1
<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>82</b>	<b>28</b>	<b>110</b>

#### **D. Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi internal Kemendikbudristek merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen aparatur sipil negara tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai lembaga yang mendukung amanat Kemdikbudristek dalam membangun sumber daya manusia melalui peningkatan mutu Pendidikan, LLDIKTI Wilayah VII berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek Tahun 2020- 2024 mampu mendorong tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas, termasuk pula manajemen serta kinerja sumber daya manusia yang tinggi. Sumber daya manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan.

Sehubungan dengan begitu pentingnya sumber daya manusia aparatur, manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula, dalam reformasi birokrasi, aspek sumber daya manusia aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek sumber daya manusia aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan public yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan LLDIKTI Wilayah VII juga merupakan hal yang sangat penting.

Mengingat pentingnya SDM aparatur, maka manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek

penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Maka dari itu, LLDIKTI Wilayah VII terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, LLDIKTI Wilayah VII memiliki empat Sasaran Strategis sebagai kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap Sasaran Strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 menggunakan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Lembaga sesuai dengan Kemendikbud No 3/M/2021 seperti tertuang dalam tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4. 1 Target Kinerja Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)						
1	Persentase layanan LLDIKTI yang tepat waktu.	%	90	92	94	96	98
2	Persentase PTS dengan peringkat akreditasi unggul, mempunyai lebih dari 3.000 (tiga ribu) mahasiswa yang terdaftar, atau meningkatkan mutu dengan cara konsolidasi dengan PTS lain.	%	21	26	31	36	41
SK2	Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi						
3	Persentase PTS yang memiliki lebih dari 30% (tiga puluh persen) lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks berkegiatan di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	21	26	31	36	41
4	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan	%	58	63	68	73	78

	antikorupsi.						
SK3	Sasaran 3: Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan						
5	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah prigram studi yang bekerja sama dengan mitra.	%	25	30	35	40	45
SK4	Sasaran 4: Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi						
6	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
7	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 80	Nilai	80	82	84	86	88

## B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran LLDIKTI Wilayah VII yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kebutuhan pendanaan Tahun 2020 - 2021 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2021**

No	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Jutaan)	
		2020	2021
1	Dukungan Manajemen	Rp. 354.644	Rp. 373.909
2	Pendidikan Tinggi	Rp. 5.075	Rp. 5.919
Jumlah		Rp. 359.719	Rp. 379.828

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2022-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan LLDIKTI Wilayah VII Periode 2022-2024**

No	Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Jutaan)			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen	Rp. 158.513	Rp. 150.432	Rp. 152.073	Rp. 461.018
2	Pendidikan Tinggi	Rp. 136.940	Rp. 271.149	Rp. 292.712	Rp. 700.801
Jumlah		Rp. 295.453	Rp. 421.581	Rp. 444.785	Rp. 1.161.819

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyesuaian Renstra LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2020-2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang menjadi mandat amant Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di perguruan tinggi. Renstra LLDIKTI Wilayah VII ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; (4) peningkatan kontribusi perguruan tinggi terhadap riset, inovasi dan ilmu pengetahuan; dan (6) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola LLDIKTI Wilayah VII.

Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi LLDIKTI Wilayah VII beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Kemendikbudristek dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Oleh karena itu, Renstra LLDIKTI Wilayah VII menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyesuaian Renstra LLDIKTI Wilayah VII menjadi pedoman dan arah pembangunan Pendidikan tinggi, riset dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 baik bagi unit kerja di lingkup LLDIKTI Wilayah VII, ataupun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di sektor pendidikan tinggi.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra LLDIKTI Wilayah VII ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang Pendidikan tinggi, riset dan teknologi, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan tinggi selama lima tahun mendatang dalam periode 2020-2024.

# LAMPIRAN